



**PROSEDUR PENAGIHAN REKENING LISTRIK
DI PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR
CABANG JEMBER**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Ahli Madya (A.Md.) Administrasi Keuangan Program Studi Diploma III
Administrasi Keuangan Jurusan Manajemen pada
Fakultas Ekonomi
Universitas Jember

Oleh :

Sunawati Elindari

NIM. 040803102201

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III
ADMINISTRASI KEUANGAN JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2007**



**PROSEDUR PENAGIHAN REKENING LISTRIK
DI PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR
CABANG JEMBER**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Oleh :

SUNAWATI ELINDARI

NIM. 040803102201

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III
ADMINISTRASI KEUANGAN JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2007**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERSETUJUAN	i
MOTTO	ii
PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Alasan Pemilihan Judul.....	1
1.2 Tujuan dan kegunaan PKN	3
1.3 Objek dan Jangka Waktu pelaksanaan PKN.....	3
1.4 Bidang Ilmu dan Jadwal Pelaksanaan PKN	4
BAB II LANDASAN TEORI	5
2.1 Pengertian Prosedur	5
2.2 Pengertian Tagihan.....	5
2.3 Pengertian Piutang	5
2.4 Cadangan Kerugian Piutang.....	6
2.5 Penilaian Piutang.	8
2.6 Metode Pencatatan Piutang	8
2.7 Penghapusan Piutang	11
2.8 Metode Penghapusan Langsung.....	11

2.9 Tugas Pokok Penagihan	12
2.10 Pengertian tata Usaha Pelanggan (TUL).....	13
BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	14
3.1 Latar Belakang Sejarah PT. PLN (PERSERO).....	14
3.2 Sejarah Singkat PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur	17
3.3 Struktur Organisasi	19
3.4 Kegiatan Pokok Perusahaan	22
3.5 Visi dan Misi PT. PLN (PERSERO)	25
BAB IV HASIL PRAKTEK KERJA NYATA	26
4.1 Tahap-tahap Penagihan Rekening Listrik di PT. PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Timur Cabang Jember	26
4.1.1 Perencanaan penagihan	28
4.1.2 Persiapan Penagihan Rekening Listrik.....	29
4.1.3 Pelaksanaan Penagihan Rekening Listrik	32
4.2 Pembuatan Tagihan Rekening Listrik.....	43
4.3 Pembuatan Pemberitahuan Pemutusan Sementara Sambungan Tenaga Listrik	46
4.4 Pembuatan Surat Penyelesaian Pemutusan Sementara Sambungan Tenaga Listrik	48
BAB V KESIMPULAN	50
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sasaran Pembangunan Nasional adalah tumbuhnya sikap kemandirian melalui peran serta, efisiensi, dan produktifitas rakyat dalam rangka meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan lahir batin (GBHN, 1993:47). Upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional diselenggarakan melalui tujuh bidang pembangunan diantaranya adalah bidang ekonomi. Bidang ekonomi ini merupakan salah satu bidang yang sangat vital bagi perkembangan pendapatan suatu negara.

Sistem perekonomian Indonesia mengenal tiga pelaku utama ekonomi yang disusun atas usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan yaitu sektor pemerintah atau negara, sektor swasta dan koperasi. Implementasi dari ketiga sektor tersebut direalisasikan dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3 yang berbunyi “ Bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat “. BUMN, BUMS dan koperasi merupakan bentuk badan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Adapun jenis perusahaan yang dimiliki oleh BUMN antara lain : Perum (Perusahaan Umum), Persero (Perusahaan Persero) dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). PLN merupakan salah satu BUMN yang berbentuk PT (Persero) yang menguasai cabang produksi terpenting milik negara. PLN menganut asas manfaat, efisiensi, berkeadilan, kebersamaan, optimasi ekonomis dalam pemanfaatan sumber daya, berkelanjutan, percaya dan mengandalkan pada kemampuan diri sendiri, keamanan dan keselamatan, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup. Sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2002 tentang ketenagalistrikan penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin tersedianya tenaga listrik dalam jumlah cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar untuk meningkatkan kesejahteraan